

GEJALA PERUBAHAN PENGUASAAN KEBUN PLASMA DAN BERKEMBANGNYA KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN PADA KOMUNITAS PETANI PIR-BUN

Undang Fadjar¹, Bambang Dradjat¹, dan Melani A. Sunito²

ABSTRACT

One of the programs for the village development that fulfill the goal for the growth and equality distribution of income is the partnership program for the Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). The objective of this program, beside to increase the productivity and the efficiency of public plantation effort is also to grant the opportunity for managing a business for the poverty stratum that do not possess plantation and fund but have the human resources capability. Then, all participants of the program are given a plasma plantation with the same width. Therefore, in support of the PIR-BUN program, the plasma plantation is the bridging for a farmer to attain the chance to increase their financial income. This research is done as a study case toward the four locations of PUR-BUN rubber plants that was chosen by purposive sampling. The four locations are consist of Rimbo Bujang (RB), Jambi, (Talang Jaya) Sumatera Selatan, Monterado-Kinande (MD) Kalimantan Barat), and Danau Salak (DS), Kalimantan Selatan Data and the information was gathered and analyzed using quantitative analysis (t-test), Gini index, and descriptive statistic). The result of this research shows that in all locations there has been a change of authorized foundation of the plasma plantation, which causes not only the permanent ownership of the foundation but also the temporary ownership of the foundation. Beside that, the changes of the ownership, the width of the foundation, and the changes of the position of the ownership from being the "owner of the foundation" becoming the "owner of the non-foundation" has made a community of the PIR-BUN farmers posses the social layers more than one. Along with that, the result of t-test of the two average values of the income between the layers of the income of the PIR-BUN shows that the average of income between each layers of PIR-BUN farmers are different. The analysis of the " Gini Index" and the analysis of the "Society group income based on the World Bank concept" shows that on the PIR-BUN community in all research location there has been an inequality in the category of "medium" or low.

Key word: *plantation authority, inequality of income, farmer, PIR-BUN, the rubber plantation.*

ABSTRAK

Salah satu program pembangunan pedesaan yang berupaya memenuhi tujuan pertumbuhan dan pemerataan diantaranya adalah program kemitraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Sasaran program ini, selain untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan rakyat juga untuk memberikan peluang

¹ Staf peneliti pada Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia

² Staf pengajar pada Institut Pertanian Bogor

usaha seluas-luasnya bagi lapisan masyarakat miskin yang tidak memiliki kebun dan modal tetapi memiliki sumberdaya tenaga kerja. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab apakah setelah 10 tahun lebih terjadi perubahan penguasaan kebun plasma serta ketidakmerataan pendapatan pada petani. Penelitian ini dilaksanakan pada empat lokasi PIR-BUN tanaman karet yang dipilih secara purposif, yaitu Rimbo Bujang (RB) Jambi, Talang Jaya (TJ) Sumatera Selatan, Monterado-Kinande (MD) Kalimantan Barat, dan Danau Salak (DS) Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan secara kuantitatif (uji beda nyata/uji-t, indeks gini, dan statistik deskriptif) dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di seluruh lokasi penelitian telah terjadi perubahan kelembagaan penguasaan kebun plasma, sehingga selain terdapat kelembagaan pemilikan tetap terdapat pula kelembagaan pemilikan sementara terutama melalui kelembagaan bagi hasil. Selain itu, perubahan-perubahan luas pemilikan, luas penggarapan, dan perubahan posisi pemilik tetap dari "pemilik penggarap" menjadi "pemilik bukan penggarap" telah membuat komunitas petani PIR-BUN memiliki lapisan sosial lebih dari satu. Bersamaan dengan itu, hasil uji beda dua nilai rata-rata pada taraf nyata 20 persen terhadap pendapatan komunitas petani PIR-BUN menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan antar lapisan petani PIR-BUN berbeda. Demikian halnya, analisis "Indeks Gini" dan analisis "pendapatan kelompok masyarakat berdasarkan konsep Bank Dunia", bahwa pada komunitas petani PIR-BUN di semua lokasi penelitian telah terjadi ketidakmerataan dengan kategori "sedang" atau rendah.

Kata kunci: *penguasaan kebun, ketidakmerataan pendapatan, petani, PIR-BUN, usahatani karet*

PENDAHULUAN

Salah satu program pembangunan pedesaan yang berupaya memenuhi tujuan pembangunan untuk pertumbuhan dan pemerataan adalah program kemitraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Sasaran program ini, selain ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan rakyat, juga diarahkan untuk memberikan peluang usaha seluas-luasnya bagi lapisan masyarakat miskin. Untuk itu, peserta program ini diprioritaskan bagi keluarga-keluarga yang tidak memiliki kebun dan modal tetapi memiliki sumberdaya tenaga kerja.

Hasil studi Nuhung (1989) menunjukkan bahwa setelah kebun plasma (karet) berproduksi selama lima tahun, petani peserta telah mampu mencapai target pendapatan sebesar 1.500 US\$/KK/Tahun. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa setelah kebun plasma dikelola petani peserta selama 10 tahun, jumlah keluarga di kedua desa penelitian tersebut meningkat 45 persen. Hal ini terjadi karena tumbuhnya keluarga petani peserta dari satu keluarga inti menjadi satu keluarga luas (*extended family*) dan selanjutnya menjadi beberapa keluarga inti, serta masuknya keluarga bukan petani peserta secara spontan ke desa-desa program kemitraan PIR-BUN untuk memperoleh lapangan usaha/kerja. Perubahan penduduk ini tentunya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi petani.

GEJALA PERUBAHAN PENGUSAHAAN KEBUN PLASMA DAN BERKEMBANGNYA KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN PADA KOMUNITAS PETANI PIR-BUN *Undang Fadjar, Bambang Dradjat, dan Melani A. Sunito*

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan rasio manusia/lahan menjadi semakin besar. Jumlah penduduk yang senantiasa berubah pasti menimbulkan perubahan pola penggunaan lahan di suatu daerah (Sajogyo, 1985; Rusli, 1982). Pertumbuhan penduduk menyebabkan makin mengecilnya persediaan lahan rata-rata per orang, semakin bertambahnya penduduk tak bertanah, dan munculnya fraksionalisasi lahan. Tekanan penduduk yang kuat akan memberi peluang semakin berkembangnya bentuk-bentuk hubungan penguasaan lahan yang kurang menguntungkan penggarap. Selain itu, tekanan penduduk yang berat akan mengakibatkan persaingan sesama buruh tani dalam mendapatkan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan kelembagaan penguasaan sumberdaya lahan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- (1) Sejauhmana perubahan kelembagaan penguasaan kebun plasma telah berlangsung pada komunitas petani program kemitraan PIR-BUN, dan
- (2) Sejauhmana ketidakmerataan pendapatan telah berlangsung pada komunitas petani program kemitraan PIR-BUN

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Dalam kegiatan usahatani, lahan (tanah) merupakan salah satu objek kelembagaan yang penting karena merupakan salah satu input produksi. Selain itu, lahan bagi petani adalah modal (*asset*) sumber nafkah yang menentukan posisi rumah tangga petani dalam pelapisan masyarakat desa. Modal lahan akan menentukan kemampuan jangkauan petani itu ke pangan, perumahan, pendidikan dan lain unsur kesejahteraan. Bahkan menurut Soemardjan (1980) ketimpangan distribusi penguasaan lahan merupakan sumber utama kemiskinan struktural di dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian halnya menurut Beteille *dalam* Amaluddin (1987) bahwa dalam masyarakat agraris, hubungan petani dengan lahan merupakan sumber utama kesenjangan ekonomi dan sosial di pedesaan. Sejalan dengan pemikiran-pemikiran tersebut, BPS dalam konsep-konsep penelitiannya juga menekankan bahwa salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani adalah luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga petani. Dengan penguasaan lahan yang lebih sempit maka hasil yang diperoleh pun akan lebih kecil. Selain itu, status lahan pertanian merupakan dimensi lain yang menarik untuk diperhatikan. Bila lahan yang dikuasai petani merupakan lahan milik orang lain yang disewa atau dibagi hasil maka akan mengurangi penghasilan petani.

Hawley (*dalam* Rusli, 1982) mengemukakan bahwa daya dukung lahan terhadap penduduk selain ditentukan oleh kualitas sumberdaya, iklim, dan kondisi fisik juga ditentukan oleh bagaimana cara-cara penduduk diorganisir untuk menggunakan sumberdaya itu. Sejalan dengan itu, Johnson (1986) mengemukakan bahwa untuk mengubah sumberdaya yang tersedia agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melakukan aktivitas produktif (*mode of production*). Oleh karena itu, selain manusia perlu menguasai teknologi ("kekuatan produksi") juga harus mampu menjalin hubungan sosial dalam bentuk kelembagaan. Hal ini diperlukan karena pemilikan sumberdaya tidak merata.

Menurut Wiradi dan Makali (1984), Gunawan (1986), serta Kano (1984) kelembagaan penguasaan lahan mencakup penguasaan tetap (komunal dan perorangan) dan penguasaan sementara (bagi hasil, sewa dan gadai). Pemilikan perorangan adalah suatu bentuk penguasaan atas sebidang tanah secara mutlak, sehingga orang tersebut dapat mengaturnya secara bebas, misalnya menyerahkan kepada ahli warisnya, menjual, serta meminta pihak lain untuk menggarap lahan miliknya baik melalui sistem sewa, sakap, atau gadai. Sistem sewa adalah suatu bentuk penyerahan sementara hak pemanfaatan/penggarapan sebidang tanah kepada orang lain, yang mana besarnya uang sewa ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penyewa serta resiko produksi ditanggung penyewa. Sistem sakap adalah suatu bentuk penyerahan sementara hak pemanfaatan/penggarapan sebidang tanah kepada orang lain, yang mana besarnya bagian hasil bagi penggarap ataupun pemilik didasarkan pada hasil perjanjian bersama mengacu pada perbandingan besarnya kewajiban menanggung sarana produksi dari masing-masing pihak. Selain itu, dalam sistem sakap tanah pemilik turut menanggung resiko produksi. Sementara itu, sistem gadai adalah suatu bentuk penyerahan sementara hak pemanfaatan/penggarapan sebidang tanah kepada orang lain, karena pemilik meminjam sejumlah uang secara tunai, dan pemilik dapat mengambil kembali hak atas tanahnya bila pinjamannya telah dibayar.

Sejalan dengan pengertian-pengertian di atas, maka dalam penelitian ini konsep penguasaan lahan mencakup pengertian penguasaan tetap (pemilikan perorangan) dan penguasaan sementara (bagi hasil, sewa, buruh upah sadap, dan gadai). Sementara itu, konsep penggarapan lahan digunakan untuk menggambarkan hak pemanfaatan sebidang tanah, baik tanah miliknya ataupun milik orang lain. Dalam konsep ini, sebagaimana konsep yang juga digunakan BPS dalam Sensus Pertanian Tahun 1995 (BPS, 1995), yang dimaksud lahan yang digarap seorang petani selain lahan miliknya sendiri termasuk juga lahan yang berasal dari pihak lain, namun dikurangi lahan miliknya yang digarapkan oleh pihak lain.

Dalam mengkaji struktur suatu kelembagaan (termasuk kelembagaan penguasaan kebun) dapat digunakan dua pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Betelie *dalam* Amaluddin (1987):

- a. Pendekatan Struktur Kelembagaan Model Skema Gradasi. Melalui pendekatan ini pembagian masyarakat menjadi dua atau lebih lapisan berdasarkan pada derajat tertentu (kuantitatif), misalnya jumlah pendapatan. Dengan demikian lapisan-lapisan tersebut bukan merupakan kolektivitas melainkan hanya merupakan kategori sosial. Keunggulan pendekatan ini adalah dapat menjelaskan konsistensi hubungan antara kategori-kategori. Kelemahannya, kategori yang dihasilkan adalah kategori angka sehingga arti sosiologis yang dapat ditunjukkan hanya samar-samar. Oleh sebab itu pendekatan ini perlu dilengkapi dengan penjelasan kualitatif.
- b. Pendekatan Struktur Kelembagaan Model Skema Hubungan Ketergantungan. Pembagian masyarakat menjadi dua atau lebih lapisan berdasarkan sifat ketergantungan tertentu antara lapisan-lapisan tersebut, baik yang bersifat dikotomi/asimetris ataupun yang fungsional/organik. Contoh model skema hubungan ketergantungan adalah pembagian masyarakat menjadi pemilik modal dan pekerja. Dengan demikian lapisan tersebut merupakan kolektivitas. Keunggulan model ini dapat menunjukkan secara jelas arti sosiologis dari hubungan-hubungan antara berbagai lapisan yang ditampilkan. Kelemahannya, kurang dapat menjelaskan konsistensi hubungan antara berbagai lapisan tersebut.

Mengacu pada pendekatan Struktur Kelembagaan Model Skema Gradasi, penguasaan kebun plasma dapat didasarkan pada:

- (1) Luas pemilikan kebun. Penelitian yang berkaitan dengan luas kebun milik bertolak dari luas kebun yang dibagikan program PIR-BUN kepada setiap petani peserta (luas standar). Oleh sebab itu, pada saat penelitian muncul posisi petani pemilik dengan luas kebun milik lebih dari standar, sama dengan standar, dan kurang dari standar.
- (2) Luas penggarapan kebun. Penelitian yang berkaitan dengan perubahan luas penggarapan kebun bertolak dari luas kebun yang seharusnya digarap sendiri oleh masing-masing petani peserta (sama dengan luas kebun berstatus milik tetap yang dibagikan program PIR-BUN kepada setiap petani peserta). Oleh sebab itu, pada saat penelitian muncul posisi petani pemilik dengan luas kebun yang digarap sendiri lebih dari standar, sama dengan standar, dan kurang dari standar.

Sementara itu, mengacu pada pendekatan Struktur Kelembagaan Model Skema Hubungan Ketergantungan, penguasaan kebun plasma dapat didasarkan pada status penguasaan kebun. Penelitian yang berkaitan dengan perubahan status penguasaan kebun bertolak dari status yang telah digariskan program PIR-BUN, yaitu pemilik tetap yang menggarap sendiri kebunnya. Oleh sebab itu, pada saat penelitian muncul lapisan petani pemilik tetap yang menggarap seluruh atau sebagian kebun miliknya ("pemilik penggarap"), petani pemilik tetap yang tidak menggarap kebun miliknya ("pemilik-bukan-penggarap"), dan petani yang tidak memiliki kebun namun menggarap kebun milik petani lain ("pemilik sementara").

Salah satu hasil penelitian sebagaimana dikemukakan Ahuja (1997) menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penduduk dan ketersediaan sumberdaya (lahan dan modal). Konsekuensi dari kondisi ini adalah pertumbuhan investasi (total) rendah dan terbatas pada individu petani pemilik lahan tertentu yang jumlahnya relatif kecil. Konsekuensi berikutnya adalah pertumbuhan modal akan tetap lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, sehingga kesempatan kerja tidak cukup untuk menampung tenaga kerja produktif. Apalagi harapan tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan di luar kebun juga terkendala oleh keterbatasan sumberdaya produktif. Kondisi tersebut lebih lanjut akan menyebabkan terjadinya pengangguran dan kemiskinan.

Dalam situasi seperti di atas, tenaga kerja produktif kemudian mau tidak mau akan bekerja di kebun plasma bersama keluarga. Penambahan tenaga kerja ini ternyata tidak meningkatkan produksi karet. Kondisi ini semakin buruk, apabila faktor produksi lain (lahan, teknologi dan modal) tetap konstan (tidak mengalami perubahan). Kegiatan tenaga kerja di kebun plasma tersebut kemudian dapat diartikan sebagai kerja bersama keluarga yang berdampak pada penurunan jam kerja dan intensitas kerja. Dalam situasi ini, mereka tidak menerapkan prinsip ekonomi dalam penggunaan tenaga kerja, yaitu produk marjinal tenaga kerja tidak sama dengan tingkat upah. Dalam istilah ilmu ekonomi, kondisi semacam ini dikenal dengan adanya pengangguran tak kentara (*disguished unemployment*). Konsekuensi logis dari pengangguran tak kentara adalah adanya penurunan standar hidup. Apabila situasi ini dibiarkan tanpa pemecahan yang mendasar, konsekuensi selanjutnya adalah terjadi apa yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Menurut White (1996), ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat disebabkan oleh ketimpangan pembagian harta (*assets*), baik harta fisik (modal, mesin, dan sebagainya) maupun harta bukan fisik, yaitu keterampilan manusia. Hal ini terjadi karena harta menghasilkan pendapatan (*income-earning assets*), sehingga makin banyak seorang memiliki harta, makin tinggi pendapatannya. Dengan demikian, jika pembagian harta terbukti menentukan pembagian pendapatan, maka usaha pemerataan pendapatan hanya dapat digarap secara efektif dengan usaha pemerataan pembagian harta. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan keadilan sosial, sekalipun pertumbuhan ekonomi masih merupakan syarat yang perlu dipenuhi (*necessary condition*), tetapi belum merupakan suatu syarat yang mencukupi (*sufficient condition*).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus pada empat lokasi PIR-BUN yang dipilih secara purposif, yaitu: Rimbo Bujang (RB) Jambi, Talang Jaya (TJ) Sumatera Selatan, Monterado-Kinande (MD) Kalimantan Barat, dan Danau Salak (DS) Kalimantan Selatan. Seluruh desa di PIR-BUN RB sebagian besar petaninya merupakan transmigran dari pulau Jawa, di PIR-BUN TJ sebagian besar petaninya

berasal dari penduduk setempat, sementara di PIR-BUN DS dan PIR-BUN MD terdapat desa-desa yang sebagian besar petaninya berasal dari penduduk setempat dan desa-desa yang sebagian besar petaninya merupakan transmigran dari pulau Jawa. Berkaitan dengan keadaan tersebut, maka di PIR-BUN RB dan PIR-BUN TJ, masing-masing hanya dipilih satu desa sedangkan di PIR-BUN DS dan PIR-BUN MD masing-masing dipilih dua desa. Pemilihan desa-desa di PIR-BUN DS dan PIR-BUN didasarkan pada kriteria berikut: desa pertama adalah desa yang sebagian besar petaninya berasal dari penduduk setempat sedangkan desa kedua adalah desa yang sebagian besar petaninya merupakan transmigran dari pulau Jawa.

Selain itu, baik PIR-BUN maupun desa yang dipilih menjadi lokasi penelitian harus memenuhi kriteria berikut: seluruh petani pada masing-masing desa kajian pada awalnya memiliki luas kebun plasma yang sama. Kebun tersebut minimal sejak tujuh tahun yang lalu telah diserahkan perusahaan inti kepada petani untuk dikelola sendiri, dan perubahan kelembagaan penguasaan kebun di desa kajian relatif paling cepat dibandingkan dengan desa lain yang ada di lokasi PIR-BUN yang sama.

Berdasarkan kriteria-kriteria dimaksud, maka desa-desa kajian yang dipilih adalah: (1) Desa Sei Jati PIR-BUN Danau Salak (SJ-DS), (2) Desa Surian Hanyar PIR-BUN Danau Salak (SH-DS), (3) Desa Perintis PIR-BUN Rimbo Bujang (PR-RB), (4) Desa Purwosari PIR-BUN Talang Jaya (PS-TJ), (5) Desa Beringin PIR-BUN Monterado-Kinande (BR-MD), dan (6) Desa Monterado PIR-BUN Monterado-Kinande (MT-MD).

Pengumpulan Data

Data dan informasi primer dikumpulkan pada tahun 1999 melalui wawancara terhadap responden rumah tangga petani PIR-BUN dan diskusi kelompok dengan informan.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud petani PIR-BUN tidak hanya petani awal tetapi juga petani pengganti (pendatang dan pecahan keluarga). Pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data penguasaan kebun adalah pendekatan rumah tangga, bukan pendekatan wilayah. Dengan demikian, kebun yang dikuasai rumah tangga petani termasuk kebun yang berada di luar wilayah tempat tinggal rumah tangga dimaksud.

Agar penelitian berjalan efektif dan efisien serta mendukung terjadinya hubungan yang mendalam antara peneliti dan responden, maka pemilihan responden secara acak berlapis (*stratified random sampling*) hanya dilaksanakan pada satu komunitas setingkat satuan unit pemukiman atau dusun yang dipilih secara purposif dari sejumlah satuan unit pemukiman atau dusun di setiap desa kajian. Kategori anggota masyarakat petani PIR-BUN yang dijadikan dasar strat-

ifikasi adalah: petani pemilik tetap, dan petani pemilik sementara. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah responden yang dipilih pada setiap komunitas adalah sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Responden pada Setiap Lokasi Penelitian, 1999

Kategori Petani Responden	Lokasi						Seluruh Lokasi
	SH-DS	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	
Pemilik tetap	23 76,67	26 86,67	56 91,80	50 83,33	30 100,00	31 100,00	216 89,26
Pemilik sementara	7 23,33	4 13,33	5 8,20	10 16,67	0 0,00	0 0,00	26 10,74
Total responden	30 100,00	30 100,00	61 100,00	60 100,00	30 100,00	31 100,00	242 100,00

Keterangan: Angka dicetak miring merupakan persentase terhadap total

Metode Analisis

Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan terhadap data dan informasi yang dikumpulkan melalui pengukuran atau penghitungan dengan jumlah data dan informasi yang cukup banyak sehingga mudah diklasifikasikan (dalam kategori-kategori). Analisis kuantitatif yang digunakan adalah uji beda nyata (uji-t), indeks gini, dan statistik deskriptif.

Uji Beda Dua Nilai Rataan (Uji-t)

Melalui uji beda dua nilai rataan akan diperoleh gambaran perbedaan rata-rata pendapatan antar lokasi penelitian maupun antar lapisan masyarakat petani PIR-BUN. Pengujian beda dua nilai rataan ini dilakukan terhadap variabel pendapatan kotor, pendapatan plasma, pendapatan non plasma, dan pendapatan bersih. Prosedur pengujian beda dua nilai rataan dengan mengasumsikan kedua nilai rataan menyebar normal dan memiliki keragaman yang sama adalah:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad (1)$$

dimana:

$$s = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 - (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (2)$$

Pengujian asumsi kesamaan dua ragam dapat dilakukan dengan menggunakan uji F:

$$F = s_1^2/s_2^2 \quad (3)$$

dimana:

- s_1^2 = ragam terbesar
- s_2^2 = ragam terkecil
- n_1-1 = derajat bebas pembilang
- n_2-1 = derajat bebas penyebut.

Namun seandainya pengujian ini tidak menghasilkan kesimpulan adanya kesamaan ragam, maka statistik uji-t yang digunakan adalah:

$$t' = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad (4)$$

dengan derajat bebas efektif

$$db = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\left[\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{(n_1 - 1)}\right] + \left[\frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{(n_2 - 1)}\right]} \quad (5)$$

Deskripsi Pendapatan Kelompok Masyarakat Berdasarkan Konsep Bank Dunia

Tingkat ketimpangan pendapatan digambarkan oleh proporsi total kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh anggota masyarakat petani PIR-BUN. Berdasarkan konsep dimaksud maka kriteria ketimpangan ditentukan sebagai berikut: jika mereka memperoleh total pendapatan kurang dari 12 persen maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi; jika mereka memperoleh total pendapatan 12-17

persen maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang, dan jika mereka memperoleh total pendapatan lebih besar dari 17 persen maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Indeks Gini

Indeks gini digunakan untuk melihat distribusi pendapatan pada masyarakat petani PIR-BUN di lokasi penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah penyebarannya merata atau timpang.

Perumusan indeks gini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (y_i^* + y^* - 1) \tag{6}$$

di mana:

- f_i = frekuensi kumulatif jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas i
- y_i = proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas i
= proporsi jumlah rumah tangga pada kelas i
- k = jumlah kelas

Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana bila nilainya mendekati satu, maka distribusi pendapatan mengalami ketimpangan. Pada penelitian ini, indeks gini dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menggambarkan distribusi penerimaan masyarakat lokasi penelitian.

Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan terhadap data dan informasi yang dikumpulkan dari para informan, berupa kasus-kasus yang menggambarkan suatu tindakan sosial petani atau tindakan sosial pihak lain yang berkaitan dengan tindakan sosial petani. Analisa kualitatif dilakukan untuk memperoleh gambaran tindakan sosial setiap lapisan petani dan sejauhmana saling ketergantungan di antara lapisan tersebut. Oleh sebab itu, dalam analisa kualitatif penentuan pelapisan petani lebih ditekankan pada pelapisan petani yang dianalisis berdasarkan pendekatan struktur kelembagaan model skema hubungan ketergantungan. Melalui pendekatan ini pembagian masyarakat petani menjadi dua atau lebih lapisan berdasarkan sifat ketergantungan tertentu antara lapisan-lapisan tersebut, baik yang bersifat dikotomi (asimetris) ataupun yang bersifat fungsional (organis). Dengan demikian lapisan tersebut merupakan kolektivitas, sehingga arti sosiologi dari tindakan sosial petani yang juga menggambarkan hubungan-hubungan antara berbagai lapisan petani dapat ditunjukkan secara jelas. Selain itu, dengan digunakannya analisa kualitatif diharapkan terjadi penafsiran dan pemahaman fakta-fakta sesuai dengan arti yang diberikan oleh para petani karena mereka dilibatkan sebagai subjek yang

mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi serta kemampuan mereka untuk memecahkan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Penguasaan Kebun Plasma

Dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kebun yang diberikan program PIR-BUN kepada seluruh petani di setiap desa dalam kondisi yang relatif sama, baik luas maupun status penguasaan kebunnya. Status penguasaan yang ditetapkan program PIR-BUN adalah pemilikan tetap perorangan. Kebun tersebut harus digarap sendiri oleh petani pemilik dan atau anggota keluarganya, sehingga petani PIR-BUN merupakan petani "pemilik penggarap".

Akan tetapi setelah program berjalan selama 7 sampai 14 tahun sejak kebun diserahkan untuk dikelola oleh masing-masing petani, kondisi semula ternyata telah berubah. Luas pemilikan (tetap) dan luas penggarapan kebun di antara petani pemilik sudah tidak sama lagi. Demikian halnya status penguasaan kebun pun sudah semakin beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di semua lokasi penelitian sebagian besar petani PIR-BUN tidak lagi merupakan petani "pemilik penggarap" tetapi hanya sebagai "petani pemilik" ("pemilik bukan penggarap"). Lebih lanjut hal ini mendorong munculnya status penguasaan kebun lain berupa pemilikan sementara. Status pemilikan sementara mereka laksanakan melalui pola bagi hasil, sewa bulanan, sewa tahunan, gadai, atau buruh upah sadap. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa pada seluruh lokasi penelitian telah terjadi perubahan kelembagaan penguasaan kebun.

Perubahan Luas Pemilikan Kebun plasma

Perubahan luas kebun berstatus milik tetap telah terjadi pada sebagian petani di semua lokasi penelitian. Proporsi petani pemilik yang luas kebun milik tetapnya berubah (bertambah atau berkurang dari luas yang telah dibagikan program PIR-BUN) mencapai 31,02 persen (Tabel 2). Perubahan tertinggi berlangsung di lokasi penelitian Desa PR-RB (55,36%), sedangkan perubahan terendah berlangsung di Desa MT-MD (6,45%).

Perubahan luas pemilikan kebun yang terjadi di sebagian besar lokasi penelitian umumnya berupa bertambahnya luas kebun, bila dibandingkan dengan luas kebun yang telah dibagikan program PIR-BUN. Untuk seluruh lokasi penelitian, proporsi petani pemilik yang kebunnya bertambah luas mencapai 79,10 persen. Di lokasi penelitian desa SJ-DS, BR-MD, dan MT-MD, proporsi petani pemilik yang kebunnya bertambah luas mencapai 100 persen dan didesa PR-RB serta desa PS-

TJ, masing-masing mencapai 83,9 persen dan 68,8 persen. Sementara itu, di lokasi penelitian Desa SH-DS proporsi petani pemilik yang kebunnya bertambah luas hanya 33,3 persen (Tabel 3).

Tabel 2. Distribusi Rumah Tangga Responden Pemilik Berdasarkan Perubahan Luas Kebun Milik (Tetap), 1999

Perubahan	Lokasi					Seluruh
	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	Lokasi
Luas milik tetap	24	25	34	20	29	149
Tidak berubah	92,31	44,64	68,00	66,67	93,55	68,98
Luas milik tetap	2	31	16	10	2	67
Tidak berubah	7,69	55,36	32,00	33,33	6,45	31,02
Jumlah	26	56	50	30	31	216
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: Angka dicetak miring merupakan persentase terhadap jumlah

Tabel 3. Distribusi Rumah Tangga Responden Pemilik Berdasarkan Arah Perubahan Luas Kebun Milik (Tetap), 1999

Arah Perubahan	Lokasi					Seluruh
	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	Lokasi
Lebih luas	2	26	11	10	2	53
	100,00	83,87	68,75	100,00	100,00	79,10
Lebih sempit	0	5	5	0	0	14
	0,00	16,13	31,25	0,00	0,00	20,90
Jumlah	2	31	16	10	2	67
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: Angka dicetak miring merupakan persentase terhadap jumlah

Secara umum, bertambahnya luas kebun milik petani terutama terjadi karena mereka membeli kebun dari petani lain. Sementara itu, di lokasi penelitian desa PR-RB bertambahnya luas pemilikan terjadi karena membeli kebun dari petani pemilik lain hampir sama dengan yang terjadi karena petani membangun sendiri kebunnya. Kebun tersebut mereka bangun sendiri pada lahan cadangan yang disediakan program PIR-BUN. Kombinasi kedua faktor di atas diduga menjadi pendorong sangat tingginya perubahan luas kebun milik tetap di lokasi penelitian desa PR-RB.

Luas kebun milik tetap yang bertambah sempit hanya terjadi di lokasi penelitian desa PR-RB, PS-TJ, dan SH-DS. Di lokasi lainnya, hal ini tidak terjadi karena sekalipun terdapat petani yang menjual kebun namun mereka menjual

seluruh kebunnya. Tampaknya hal ini berkaitan dengan umur kebun yang relatif masih muda sehingga harganya pun relatif murah atau berkaitan dengan kebun yang diperoleh dari proyek PIR-BUN tidak cukup luas (kurang dari 2 Ha). Bertambah sempitnya kebun milik di lokasi penelitian PR-RB dan PS-TJ umumnya terjadi karena petani menjual sebagian kebun miliknya. Di Desa SH-DS banyaknya kepemilikan yang bertambah sempit selain terjadi karena banyaknya petani yang menjual sebagian kebun miliknya juga terutama karena berlangsungnya bencana kebakaran sehingga kebun menjadi rusak.

Petani yang memiliki kebun lebih luas dari pada yang diterima dari program PIR-BUN merupakan petani yang memiliki kemampuan meningkatkan penguasaan faktor produksi lebih cepat. Untuk mencapai itu, selain mereka harus memiliki kemampuan yang baik dalam membaca peluang ekonomi juga mereka harus memiliki modal (berupa uang kontan) yang cukup besar. Pada masa-masa awal harga kebun relatif murah. Keadaan ini berkaitan dengan masih rendahnya rasa memiliki petani terhadap kebun yang sedang diusahakan, selain karena produktivitas kebun juga masih rendah. Sebagian besar petani masih ragu apakah kebun yang sedang mereka garap selanjutnya benar-benar akan menjadi miliknya dan menjamin masa depan atau mungkin suatu saat akan diambil kembali oleh pemerintah. Pada saat penelitian berlangsung para petani telah meyakini bahwa kebun yang sedang mereka garap merupakan miliknya. Bersamaan dengan itu, harga kebun pun sudah relatif mahal.

Petani yang luas kebun miliknya berkurang, umumnya terjadi karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi, misalnya ketika salah satu anggota keluarganya sakit. Untuk mengatasi masalah kekurangan biaya tersebut satu-satunya jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat menemukannya adalah menjual sebagian kebun miliknya. Selain itu, munculnya petani yang luas kebun miliknya lebih sempit juga berkaitan dengan adanya pendatang yang hanya mampu membeli sebagian kebun yang dijual petani lain.

Perubahan Luas Penggarapan Kebun plasma

Perubahan luas kebun yang digarap sendiri telah berlangsung pada sebagian petani di semua lokasi penelitian. Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa proporsi petani pemilik di seluruh lokasi yang luas kebun digarap sendiri berubah mencapai 48,6 persen. Bahkan, di empat lokasi penelitian yaitu Desa SH-DS; Desa PR- RB; Desa PS-TJ; dan Desa MT-MD, perubahan tersebut mencapai angka di atas 50 persen. Proporsi perubahan luas penggarapan paling sedikit terjadi di desa SJ-DS (11,54%).

Berbeda dengan arah perubahan luas kepemilikan yang sebagian besar menuju arah lebih luas, ternyata proporsi petani pemilik yang perubahan luas penggarapannya menuju arah lebih luas pada seluruh lokasi penelitian hanya 29,52 persen. Proporsi tertinggi terjadi di lokasi Desa BR-MD yaitu 84,62 persen.

Tabel 4. Distribusi Rumah Tangga Responden Pemilik Tetap Berdasarkan Perubahan Luas Kebun yang Digarapnya, 1999

Perubahan	Lokasi					Seluruh
	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	Lokasi
Luas garapan	23	23	24	17	13	111
Tidak berubah	88,46	41,07	48,00	56,67	41,94	51,39
Luas garapan	3	33	26	13	18	105
Berubah	11,54	58,93	52,00	43,33	58,06	48,61
Jumlah	26	56	50	30	31	216
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: Angka dicetak miring merupakan persentase terhadap jumlah

Perubahan Posisi Petani dari "Pemilik Penggarap" Menjadi "Pemilik Bukan Penggarap"

Petani PIR-BUN diarahkan untuk menjadi petani pemilik tetap (perorangan). Secara konsepsional, seseorang yang dapat menguasai sebidang tanah (kebun plasma) secara mutlak akan dapat mengaturnya secara bebas, misalnya mewariskan, menjual, atau meminta pihak lain untuk menggarapnya. Akan tetapi, mengingat kebun tersebut diperoleh diperoleh dengan cara kredit, maka sepanjang kredit belum lunas, petani tidak diijinkan mengalihkan penggarapan kebun kepada pihak lain. Dengan kata lain, selama sebagai pemilik tetap mereka harus menggarap sendiri kebun miliknya atau berstatus sebagai "pemilik-penggarap".

Tabel 5. Distribusi Rumah Tangga Petani Pemilik Tetap Berdasarkan Posisi "Pemilik-Penggarap" dan "Pemilik Bukan Penggarap", 1999

Posisi Rumah Tangga Petani	Lokasi						Seluruh
	SH-DS	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	Lokasi
Pemilik-penggarap	66	77	40	42	107	36	368
	76,74	98,72	88,89	82,35	93,04	58,06	84,21
Pemilik bukan penggarap	20	1	5	9	8	26	69
	23,26	1,28	11,11	17,65	6,96	41,94	15,79
Jumlah rumah tangga Petani	86	78	45	51	115	62	437
	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan : Angka dicetak miring merupakan persentase terhadap jumlah

Sumber Data : Hasil sensus terbatas pada tingkat RW

Akan tetapi, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ternyata telah banyak petani yang berstatus sebagai "pemilik bukan penggarap" (Tabel 5).

GEJALA PERUBAHAN PENGUSAHAAN KEBUN PLASMA DAN BERKEMBANGNYA KETIDAK-MERATAAN PENDAPATAN PADA KOMUNITAS PETANI PIR-BUN *Undang Fadjar, Bambang Dradjat, dan Melani A. Sunito*

Proporsi petani "pemilik-penggarap" yang berubah menjadi "pemilik bukan penggarap" mencapai 15,79 persen, terutama terjadi di lokasi SH-DS (23,26%) dan MT-MD (41,94%).

Gejala Ketidakmerataan Pendapatan Petani PIR-BUN

Sebagai suatu komunitas yang diharapkan dapat tumbuh bersama, semula masyarakat petani di desa-desa PIR-BUN diharapkan hanya terdiri dari para petani yang memiliki posisi "pemilik tetap" saja. Akan tetapi, saat ini juga didapati petani yang memiliki posisi "pemilik sementara", yaitu para petani yang menggarap kebun milik orang lain. Mengingat adanya perubahan posisi di atas, maka objek analisis dalam pembahasan selanjutnya akan menggunakan komunitas petani PIR-BUN yang hanya terdiri dari para petani "pemilik tetap" (sebagai komunitas yang diharapkan) atau komunitas petani PIR-BUN yang terdiri dari para petani "pemilik tetap" dan "pemilik sementara" sebagai kondisi faktual.

Secara keseluruhan, rata-rata pendapatan petani pada akhir tahun 1999 telah melebihi target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 3,5 juta/rumah tangga/tahun. Target tersebut dapat dicapai baik oleh petani "pemilik tetap", maupun "pemilik tetap + pemilik sementara" (Tabel 6).

Tabel 6. Pendapatan Petani Sesuai Status Pemilikan Kebun, 1999 (dalam Rupiah)

Uraian	Lokasi						Seluruh Lokasi
	SH-DS	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	
-Pemilik Tetap							
Rata-rata	4.731.637	4.459.930	7.258.971	8.410.093	3.508.973	9.213.862	6.679.129
Tertinggi	14.193.700	13.572.173	51.204.999	39.483.300	6.785.300	53.052.950	53.052.950
Terendah	790.869	353.850	627.200	1.215.300	1.251.600	2.310.600	353.850
Pemilik Sementara							
Rata-rata	3.136.815	1.236.261	3.753.625	4.844.083	-	-	3.619.681
Tertinggi	6.248.695	2.347.326	7.190.000	10.985.915	-	-	10.985.915
Terendah	757.250	532.500	1.380.000	2.331.690	-	-	532.500
Pemilik Tetap + Pemilik Sementara							
Rata-rata	4.359.512	4.030.108	6.971.648	7.815.758	3.508.973	9.213.862	6.350.428
Tertinggi	14.193.700	13.572.173	51.204.999	39.483.300	6.785.300	53.052.950	53.052.950
Terendah	757.250	353.850	627.200	1.215.300	1.251.600	2.310.600	353.850

Hasil uji beda dua nilai rata-rata (pada taraf nyata 20%) menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan komunitas petani "pemilik tetap" antar lokasi penelitian dapat berbeda (Tabel Lampiran 1). Rata-rata pendapatan yang nilainya berada pada kategori tinggi terdapat di Desa PS-TJ (Rp 8,4 juta); kategori sedang di Desa MT-MD (Rp 9,2 juta), Desa PR-RB (Rp 7,3 juta), SH-DS (Rp 4,7 juta), dan SJ-DS (Rp 4,5 juta); dan kategori rendah di Desa BR-MD (Rp 3,5 juta).

Tingginya rata-rata pendapatan di Desa PS-TJ berkaitan dengan tingginya pendapatan dari kebun plasma, yang paling tinggi diantara semua lokasi penelitian.

Sebaliknya, tingginya rata-rata pendapatan di Desa MT-MD berkaitan dengan tingginya pendapatan dari sumber non plasma, meskipun pendapatan dari kebun plasma paling rendah diantara semua lokasi penelitian.

Perubahan-perubahan luas pemilikan, luas penggarapan, dan perubahan posisi pemilik tetap dari "pemilik penggarap" menjadi "pemilik bukan penggarap" telah membuat komunitas petani "pemilik tetap" memiliki lapisan sosial lebih dari satu. Hasil uji beda dua nilai rata-rata pada taraf nyata 20 persen terhadap komunitas petani "pemilik tetap" (K1, K2, K3) menunjukkan gambaran berikut:

- (1) Jika komunitas petani "pemilik tetap" dibedakan atas lapisan petani "pemilik lebih luas" ($K1 = 1$), "pemilik sesuai standar/pembagian proyek" ($K1 = 0$), dan "pemilik lebih sempit" ($K1 = -1$), nampak bahwa pada komunitas "pemilik tetap" rata-rata pendapatan petani "pemilik lebih luas" paling tinggi dibandingkan "pemilik sesuai standar" maupun "pemilik lebih sempit". Perubahan posisi dari lapisan "pemilik sesuai standar" ke lapisan "pemilik lebih luas" telah memberi peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Sebaliknya, perubahan posisi dari lapisan "pemilik sesuai standar" ke lapisan "pemilik lebih sempit" tidak menyebabkan lebih kecilnya pendapatan, karena terdapat peluang untuk memperoleh pendapatan melalui pemilikan sementara. Fenomena tersebut juga terjadi pada komunitas "pemilik tetap", kecuali di Desa PS-TJ dan BR-MD, karena rata-rata pendapatan antar lapisan petani tidak berbeda.
- (2) Pada komunitas "pemilik tetap", rata-rata pendapatan lapisan petani yang "menggarap kebun lebih sempit" lebih tinggi dibandingkan yang lain. Meskipun menggarap kebun lebih sempit, namun mereka memperoleh pendapatan dari sumber lain, diantaranya dari sumber non kebun plasma. Selain di Desa PR-RB, rata-rata pendapatan antar lapisan petani relatif sama.
- (3) Pada komunitas "pemilik tetap", rata-rata pendapatan petani "pemilik penggarap" lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan petani "pemilik bukan penggarap". Hal ini mengindikasikan bahwa anjuran program PIR-BUN untuk menggarap kebunnya sendiri perlu diteruskan karena mereka akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bila tidak menggarapnya sendiri. Fenomena ini hanya ditemukan di Desa PR-RB, BR-MD, dan MT-MD.
- (4) Pada komunitas petani "pemilik tetap + pemilik sementara" rata-rata pendapatan lapisan petani "pemilik tetap" lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan lapisan petani "pemilik sementara", terutama di Desa SJ-DS.

Pada umumnya, petani "pemilik tetap" maupun petani "pemilik sementara" masih mengandalkan kebun plasma sebagai sumber pendapatan utamanya, kecuali "pemilik tetap" di Desa MT-MD dan "pemilik sementara" di Desa PR-RB (Tabel 7). Secara keseluruhan, proporsi pendapatan dari sumber kebun plasma

mencapai 68,15 persen, sedangkan pendapatan dari sumber non kebun plasma hanya 31,85 persen. Artinya, sumber pendapatan kebun plasma masih mempunyai arti penting bagi petani PIR-BUN di semua lokasi penelitian.

Tabel 7. Proporsi Pendapatan Petani PIR-BUN dari Plasma dan Non-plasma pada Berbagai Status Petani, 1999 (dalam persen)

Status Petani/ Sumber Pendapatan	Lokasi						Seluruh Lokasi
	SH-DS	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	
Pemilik Tetap							
- Plasma	80,96	71,33	68,76	76,36	81,19	21,99	67,27
- Non Plasma	19,04	28,67	31,24	23,64	18,81	78,01	37,73
Pemilik Sementara							
- Plasma	65,80	100,00	32,07	97,52	-	-	77,20
- Non Plasma	34,20	0,00	67,93	2,48	-	-	22,80
Pemilik Tetap+Sementara							
- Plasma	78,01	72,92	67,14	76,77	74,17	20,25	68,15
- Non Plasma	31,99	27,08	32,86	23,23	25,83	79,75	31,85

Menonjolnya pendapatan petani non plasma di MT-MD disebabkan karena banyak yang mengusahakan tambang emas (dompok), sementara di PR-RB dengan berusahatani sayuran. Sumber pendapatan petani dari non-plasma yang mendukung kehidupan petani adalah non-pertanian, pertanian non-kebun dan kebun non-plasma (Tabel 8).

Tabel 8. Rata-rata Pendapatan Non Kebun Plasma, 1999 (dalam rupiah)

Sumber Pendapatan	Lokasi						Seluruh Lokasi
	SH-DS	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	
Kebun non plasma	0	0	127.245	0	0	558.811	103.657
Pertanian non kebun	540.625	192.500	303.293	17.391	434.000	271.414	260.215
Non pertanian	1.204.375	3.899.625	2.673.829	4.284.348	553.909	6.869.690	7.668.852
Total non kebun plasma	1.745.000	4.092.125	3.104.367	4.301.739	987.909	7.699.915	8.032.724

Sekalipun secara umum rata-rata pendapatan petani telah mencapai target, namun koefisien keragaman pendapatan komunitas petani "pemilik tetap" sangat tinggi, yaitu mencapai angka 109,38 persen (Tabel 9). Bahkan angka tersebut jauh melebihi koefisien keragaman luas pemilikan kebun (60,4%) ataupun koefisien keragaman luas penggarapan kebun (66,30%). Koefisien keragaman sangat tinggi juga terjadi pada komunitas petani "pemilik tetap" di Desa PR-RB (118,04%) dan Desa MT-MD (117,80%); koefisien keragaman relatif tinggi terjadi pada komunitas petani "pemilik tetap" di Desa PS-TJ (86,05%); Desa SH-DS (63,88%); dan Desa SJ-DS (63,53%); dan koefisien keragaman relatif rendah hanya terjadi pada komunitas petani "pemilik tetap" di Desa BR-MD (37,39%).

Lebih lanjut, bila petani "pemilik sementara" dimasukkan sebagai bagian dari komunitas petani PIR- BUN sehingga komunitas tersebut menjadi "pemilik tetap + pemilik sementara", ternyata hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien keragaman pendapatannya semakin besar, yakni mencapai angka 110,40 persen (Tabel 9). Keadaan ini juga terjadi pada semua lokasi penelitian.

Tabel 9. Koefisien Keragaman Pendapatan Petani pada Berbagai Komunitas Petani PIR-BUN, 1999 (dalam persen)

Komunitas Petani PIR-BUN	Lokasi						Seluruh Lokasi
	SH-DS	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	
- Pemilik Tetap	63,88	63,53	118,04	86,05	37,39	117,80	109,38
- Pemilik Sementara	56,50	65,39	58,50	59,40	-	-	68,58
- Pemilik Tetap + Pemilik Sementara	65,09	71,19	118,77	87,30	37,39	117,80	110,40

Tingginya koefisien keragaman pendapatan tersebut memberikan indikasi adanya ketidakmerataan atau ketimpangan. Untuk mengetahui sejauhmana ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan telah terjadi pada komunitas petani PIR-BUN akan digunakan analisis kuantitatif Indeks Gini (pendekatan pengeluaran) dan analisis deskripsi pendapatan kelompok masyarakat berdasarkan konsep Bank Dunia (Tabel 10).

Tabel 10. Indeks Gini Lokasi Penelitian dan Indeks Gini Daerah Pedesaan di Provinsi Lokasi Penelitian, 1999

Lokasi Penelitian/Provinsi	Indeks Gini Lokasi Penelitian*	Indeks Gini Daerah Pedesaan di Lokasi Penelitian
PIR-BUN Danau Salak/Kal-Sel	0,479	0,292
PIR-BUN Rimbo Bujang/Jambi	0,712	0,246
PIR-BUN Talang Jaya/Sum-Sel	0,701	0,300
PIR-BUN Monterado/Kal-Bar	0,645	0,300

Sumber : * Data diolah dari data primer, 1998

** Statistik Kesejahteraan Rakyat 1996, Biro Pusat Statistik.

Berdasarkan analisis kuantitatif tersebut ketidakmerataan terjadi terutama di RB, TJ, dan MD (Tabel 10). Apabila Indeks Gini di lokasi dibandingkan dengan Indeks Gini daerah pedesaan di masing-masing provinsi lokasi penelitian (tahun 1996), maka ketimpangan di setiap lokasi penelitian melebihi tingkat ketimpangan daerah pedesaan. Hasil perbandingan ini mengungkapkan adanya suatu ironi dari tujuan pembangunan PIR-BUN, yaitu tidak tercapainya tujuan pemerataan pendapatan. Tampaknya perlu peninjauan kembali pelaksanaan program PIR-BUN karena tidak mampu menjamin pemerataan.

GEJALA PERUBAHAN PENGUASAAN KEBUN PLASMA DAN BERKEMBANGNYA KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN PADA KOMUNITAS PETANI PIR-BUN *Undang Fadjar, Bambang Dradjat, dan Melani A. Sunito*

Dengan menggunakan konsep Bank Dunia ternyata diperoleh gambaran yang relatif sama (Tabel 11). Distribusi pendapatan di setiap lokasi penelitian menunjukkan adanya ketimpangan, baik yang memiliki kategori sedang (PIR-BUN RB, TJ, dan MD) maupun kategori rendah (PIR-BUN DS). Bila dibandingkan dengan keadaan di daerah pedesaan di provinsi lokasi penelitian nampak bahwa distribusi pendapatan di lokasi-lokasi PIR-BUN lebih timpang.

Tabel 11. Indikator Pendapatan dan Konsumsi Lokasi Penelitian dan Daerah Pedesaan di Lokasi Penelitian, 1999

Lokasi Penelitian/ Provinsi	40% Terendah Lokasi PIR-BUN*	40% Terendah Daerah Pedesaan di Provinsi Lokasi Penelitian**
PIR-BUN Danau Salak/Kal-Sel	18,66	23,2
PIR-BUN Rimbo Bujang/Jambi	13,96	26,2
PIR-BUN Talang Jaya/Sum-Sel	14,35	23,0
PIR-BUN Monterado/Kal-Bar	16,64	22,4

Sumber: * Data diolah

** Indikator Kesejahteraan Masyarakat, 1997. BPS

Hasil analisis kedua pendekatan mengisyaratkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di lokasi PIR-BUN. Kesenjangan pendapatan ini terjadi karena adanya perubahan penguasaan lahan, terutama pemilikan yang sudah tidak lagi sesuai dengan luas pemilikan standar. Selain faktor kelembagaan penguasaan lahan, faktor-faktor lain seperti kesempatan kerja di luar plasma, kondisi infrastruktur, diperkirakan juga berpengaruh terhadap perubahan distribusi pendapatan di PIR. Faktor-faktor lain tersebut terkait dengan pertumbuhan ekonomi di luar PIR, baik di daerah pedesaan sekitar PIR-BUN maupun di kota terdekat. Jadi fenomena ketimpangan pendapatan di PIR-BUN tidak hanya terkait dengan perubahan internal di PIR, tetapi juga terkait dengan perubahan eksternal.

KESIMPULAN

1. Data dan informasi tentang penguasaan kebun menunjukkan bahwa di seluruh lokasi penelitian telah terjadi perubahan kelembagaan penguasaan kebun plasma. Pada awalnya kelembagaan penguasaan hanya berbentuk pemilikan tetap (perorangan) yang digarap sendiri oleh pemilikinya, namun saat ini selain terdapat kelembagaan pemilikan tetap terdapat pula kelembagaan pemilikan sementara terutama melalui kelembagaan bagi hasil. Bersama dengan itu, baik luas pemilikan maupun luas penggarapan juga semakin beragam. Perubahan tersebut nampak lebih dominan pada perubahan luas penggarapan terlihat dari fakta bahwa proporsi petani pemilik yang luas kebun miliknya berubah hanya 31,02 persen sedangkan proporsi petani pemilik yang luas kebun

milik digarapnya sendiri berubah mencapai 48,61 persen. Perubahan luas pemilikan (tetap) menuju kearah meningkatnya proporsi petani yang luas kebun miliknya bertambah. Sebaliknya perubahan luas penggarapan kebun menuju ke arah meningkatnya proporsi petani yang luas kebun digarap bertambah sempit. Perubahan-perubahan tersebut di satu pihak telah mengurangi jumlah "pemilik tetap", namun dipihak lain telah membuka peluang berusaha/bekerja bagi rumah tangga yang tidak memiliki kebun ("pemilik sementara").

2. Perubahan-perubahan luas pemilikan, luas penggarapan, dan perubahan posisi pemilik tetap dari "pemilik penggarap" menjadi "pemilik bukan penggarap" telah membuat komunitas petani PIR-BUN memiliki lapisan sosial lebih dari satu. Bersamaan dengan itu, hasil uji beda dua nilai rata-rata pada taraf nyata 20% terhadap pendapatan komunitas petani PIR-BUN menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan antar lapisan petani PIR-BUN dapat berbeda, yaitu:
 - rata-rata pendapatan petani "pemilik lebih luas" lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan petani "pemilik sesuai standar" maupun lapisan petani "pemilik lebih sempit".
 - rata-rata pendapatan petani yang "menggarap kebun lebih sempit" lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan lapisan petani yang "menggarap kebun sesuai standar" maupun lapisan petani yang "menggarap kebun lebih luas".
 - rata-rata pendapatan lapisan petani "pemilik penggarap" lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan lapisan petani "pemilik bukan penggarap".
 - rata-rata pendapatan lapisan petani "pemilik tetap" lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan lapisan petani "pemilik sementara".
3. Sekalipun secara umum rata-rata pendapatan petani PIR-BUN telah mencapai target, tetapi koefisien keragaman pendapatan komunitas petani PIR-BUN sangat tinggi, yaitu mencapai 109,38 persen. Hal ini mengindikasikan adanya fenomena ketidakmerataan. Lebih lanjut, dengan menggunakan analisis "Indeks Gini" dan analisis "pendapatan kelompok masyarakat berdasarkan konsep Bank Dunia" dapat dijelaskan bahwa pada komunitas petani PIR-BUN di semua lokasi penelitian telah terjadi ketidakmerataan dengan kategori "sedang" atau rendah. Ketidakmerataan yang terjadi di lokasi PIR-BUN melebihi ketidakmerataan yang terjadi pada masyarakat pedesaan di setiap provinsi lokasi penelitian.
4. Adanya fakta bahwa pada komunitas petani PIR-BUN telah terjadi perubahan penguasaan lahan yang diikuti oleh ketidakmerataan pendapatan menunjukkan bahwa usahatani kebun yang bertumpu pada penguasaan aset lahan masih menjadi sumber utama pendapatan komunitas petani PIR-BUN. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada komunitas tersebut usaha lain belum mampu menjadi sumber pendapatan utama bagi petani yang berlahan sempit. Keadaan ini lebih lanjut berpotensi menyebabkan meningkatnya potensi konflik horizontal diantara anggota komunitas akibat meningkatnya persaingan dalam menguasai lahan.

Oleh sebab itu, upaya pengembangan industri hilir perkebunan di pedesaan melalui pola yang memberikan peluang berusaha dan bekerja bagi anggota komunitas (melalui pola patungan antara pengusaha dengan petani) dapat dijadikan langkah untuk menghambat berkembangnya gejala ketidakmerataan pendapatan pada komunitas petani PIR-BUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahuja, H.L. 1997. *Modern Economics*. S. Chand & Company Ltd. New Delhi.
- Amaluddin, M. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial - Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal Jawa Tengah*. UI-Press. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 1995. *Analisis Profil Rumah tangga Pertanian Provinsi Kalimantan Timur dalam Sensus Pertanian 1993*. Jakarta-Indonesia.
- Gunawan, M. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalihan Hak Penggunaan Lahan di Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang, Departemen Pertanian. Bogor.
- Johnson, P. D. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid I)*. Gramedia. Jakarta.
- Kano, Hiroyoshi. 1984. *Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa Pada Abad XIX dalam Sediono M.P.Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Penyunting) Dua Abad Penguasaan Tanah. Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. P.T. Gramedia Jakarta.
- Nuhung, I. A. 1989. *Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Dalam Konteks Pembangunan Wilayah, Suatu Pendekatan Sosial Ekonomi, Studi Kasus Sumatera Selatan*. Disertasi. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Rusli, S. 1982. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. LP3ES, Jakarta.
- Sajogyo. 1985. *Penduduk dan Pola Penggunaan Tanah dalam S.M.P. Tjondronegoro, S.*
- Sajogyo. 1988. *Masalah Kemiskinan di Indonesia antara Teori dan Praktek*. *Mimbar Sosek*. No. 2 Ed. September 1988. Pp 1-14. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soemardjan, S. 1980. *Kemiskinan Struktural dan Pembangunan dalam Alfian, et. al. (Eds.). Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta.
- White. B. 1996. *Optimisme Makro, Pesimisme Mikro? Penaksiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia, 1967-1987 dalam Sitorus (ed.)*

Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. PT Grasindo. Jakarta.

Wiradi, Gunawan dan Makali. 1984. Penguasaan Tanah dan Kelembagaan *dalam* Faisal Kasryno (Penyunting) Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Tabel Lampiran 1. Hasil Uji Beda Nyata Pendapatan Komunitas Petani PIR-BUN Antar Lokasi dan Antar Lapisan pada Setiap Lokasi, 1999

Variabel Pendapatan dan Kelembagaan	Desa PIR						Seluruh PIR
	SH-DS	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	
1. Pendapatan Plasma							
a. Pemilik Tetap	3.844.246 ^{bc}	3.200.815 ^{bc}	4.991.471 ^{ab}	6.255.298 ^a	2.848.840 ^{bc}	2.033.942 ^c	
- K ₁ = -1	2.244.520 ^b	-	1.883.477 ^b	6.670.299 ^{ab}	-	-	3.696.211 ^b
- K ₁ = 0	3.767.687 ^b	2.978.292 ^b	4.349.259 ^{ab}	5.191.924 ^b	2.628.466 ^a	2.032.216 ^a	3.572.417 ^b
- K ₁ = 1	7.694.451 ^a	5.871.087 ^a	6.206.674 ^a	9.353.456 ^a	3.289.588 ^a	2.058.975 ^a	6.196.348 ^a
- K ₂ = -1	2.654.842 ^b	1.577.565 ^a	6.708.121 ^a	5.884.756 ^a	2.252.625 ^a	1.730.431 ^a	4.458.651 ^a
- K ₂ = 0	4.783.563 ^{ab}	3.412.543 ^b	3.753.202 ^a	6.689.610 ^a	3.028.562 ^a	2.252.625 ^a	4.132.898 ^a
- K ₂ = 1	6.595.202 ^a	-	4.360.683 ^a	5.726.882 ^a	2.737.521 ^a	3.040.600 ^a	3.991.992 ^a
- K ₃ = 0	2.560.160 ^b	1.062.000 ^b	8.494.443 ^a	5.870.569 ^a	1.985.300 ^a	1.518.976 ^b	4.389.056 ^a
- K ₃ = 1	4.406.034 ^a	3.379.050 ^a	4.320.689 ^b	6.420.182 ^a	2.878.617 ^a	2.405.863 ^a	4.178.449 ^a
b. Pemilik Tetap+Sementara	3.428.845 ^{bc}	2.938.875 ^{bc}	4.680.992 ^{bc}	6.000.096 ^a	1.748.840 ^{bc}	2.033.942 ^c	
- K ₄ = 0	2.063.958 ^b	1.236.261 ^b	1.203.625 ^b	4.724.083 ^a	-	-	2.794.296 ^b
- K ₄ = 1	3.844.246 ^a	3.200.815 ^a	4.991.471 ^a	6.255.298 ^a	2.848.840	2.033.942	4.224.276 ^a
2. Pendapatan Non Plasma							
a. Pemilik Tetap	887.391 ^b	1.259.115 ^b	2.267.500 ^b	2.154.795 ^b	660.133 ^b	7.179.920 ^a	
- K ₁ = -1	253.000 ^a	-	71.600 ^a	807.500 ^a	-	-	616.393 ^a
- K ₁ = 0	823.412 ^a	1.034.042 ^a	1.498.320 ^a	1.937.125 ^a	608.600 ^a	5.761.294 ^b	2.156.945 ^a
- K ₁ = 1	2.700.000 ^a	396.000 ^a	3.305.462 ^a	3.440.000 ^a	763.200 ^a	27.750.000 ^a	3.778.000 ^a
- K ₂ = -1	1.118.364 ^a	2.208.333 ^a	4.448.857 ^a	3.958.929 ^a	2.400.000 ^a	10.929.507 ^a	5.069.765 ^a
- K ₂ = 0	737.091 ^a	1.135.304 ^a	1.008.695 ^a	933.427 ^a	585.235 ^b	3.550.415 ^a	1.224.564 ^b
- K ₂ = 1	0 ^a	-	862.833 ^a	440.000 ^a	459.545 ^b	775.000 ^a	618.032 ^b
- K ₃ = 0	1641.429 ^a	2.400.000 ^a	8.495.778 ^a	5.206.500 ^a	4.800.000 ^a	13.057.855 ^a	7.348.971 ^a
- K ₃ = 1	557.500 ^a	1.164.042 ^a	1.074.851 ^b	846.922 ^b	517.379 ^b	2.934.744 ^b	1.093.767 ^b
b. Pemilik Tetap+Sementara	930.667 ^b	1.091.233 ^b	2.290.656 ^b	1.815.663 ^b	660.133 ^b	7.179.920 ^a	
- K ₄ = 0	1.072.857 ^a	0 ^a	2.267.500 ^a	12.000 ^a	-	-	825.385 ^a
- K ₄ = 1	887.391 ^a	1.259.115 ^a	2.550.000 ^a	2.154.795 ^a	660.133	7.179.920 ^a	2.454.853 ^a

Tabel Lampiran 1. (lanjutan)

Variabel Pendapatan dan Kelembagaan	Desa PIR						Seluruh PIR
	SH-DS	SJ-DS	PR-RB	PS-TJ	BR-MD	MT-MD	
3. Pendapatan Kotor							
a. Pemilik Tetap	4.731.637 ^{ab}	4.459.930 ^{ab}	7.258.971 ^{ab}	8.410.093 ^{ab}	3.508.973 ^b	9.213.862	
- K ₁ = -1	2.497.520 ^b	-	2.599.477 ^b	7.477.799 ^a	-	-	4.312.604 ^b
- K ₁ = 0	4.591.099 ^b	4.012.334 ^a	5.847.579 ^{ab}	7.129.049 ^a	3.237.066 ^a	7.793.510 ^b	5.729.362 ^b
- K ₁ = 1	10.394.451 ^a	9.831.087 ^b	9.512.136 ^a	12.793.456 ^a	4.052.788 ^a	29.808.975 ^a	9.974.348 ^a
- K ₂ = -1	3.773.206 ^a	3.785.899 ^a	11.156.979 ^a	9.843.684 ^a	4.333.450 ^a	3.815.600 ^a	9.528.416 ^a
- K ₂ = 0	5.520.654 ^a	4.547.848 ^a	4.761.897 ^b	7.623.037 ^a	3.613.798 ^a	5.803.040 ^a	5.357.462 ^b
- K ₂ = 1	6.595.202 ^a	-	5.223.517 ^b	6.166.882 ^a	3.197.066 ^a	12.659.938 ^a	4.610.024 ^b
- K ₃ = 0	4.201.588 ^a	3.462.000 ^a	16.990.221 ^a	11.077.069 ^a	6.785.300 ^a	14.576.831 ^a	11.738.026 ^a
- K ₃ = 1	4.963.534 ^a	4.543.091 ^a	5.395.540 ^b	7.267.104 ^a	3.395.996 ^b	5.340.607 ^b	5.272.216 ^b
b. Pemilik Tetap+Sementara	4.359.512 ^b	4.030.108 ^b	6.971.648 ^{ab}	7.815.758 ^{ab}	3.508.973 ^b	9.213.862 ^a	
- K ₄ = 0	3.136.815 ^a	1.236.261 ^b	3.753.625 ^a	4.844.083 ^a	-	-	3.619.681 ^b
- K ₄ = 1	4.731.637 ^a	4.459.930 ^a	7.258.971 ^a	8.410.093 ^a	3.508.973	9.213.862	6.679.129 ^a
4. Pendapatan Bersih							
a. Pemilik Tetap	1.388.794 ^a	1.069.688 ^a	2.450.304 ^a	3.002.749 ^a	2.739.850 ^a	2.850.982 ^a	
- K ₁ = -1	-5.515.881 ^b	-	16.727 ^a	2.831.479 ^a	-	-	984.108 ^a
- K ₁ = 0	1.176.264 ^{ab}	750.038 ^b	1.600.191 ^a	2.168.532 ^a	141.171 ^a	2.253.534 ^b	1.475.894 ^a
- K ₁ = 1	6.204.651 ^a	4.905.487 ^a	3.735.717 ^a	5.659.083 ^a	539.508 ^a	11.513.975 ^a	3.962.676 ^a
- K ₂ = -1	773.370 ^a	917.232 ^a	4.709.729 ^a	3.129.232 ^a	651.950 ^a	4.509.982 ^a	3.369.467 ^a
- K ₂ = 0	1.983.054 ^a	1.089.574 ^a	851.171 ^a	3.253.170 ^a	203.121 ^a	1.192.148 ^a	1.472.773 ^{ab}
- K ₂ = 1	1.621.602 ^a	-	1.561.317 ^a	1.269.502 ^a	314.685 ^a	361.400 ^a	996.427 ^b
- K ₃ = 0	1.007.703 ^a	852.000 ^a	9.433.165 ^a	3.890.515 ^a	944.300 ^a	5.479.223 ^a	4.769.965 ^a
- K ₃ = 1	1.555.521 ^a	1.087.829 ^a	1.113.161 ^a	2.622.278 ^a	250.834 ^a	952.807 ^a	1.298.930 ^b
b. Pemilik Tetap+Sementara	1.159.952 ^a	777.618 ^a	2.347.501 ^a	2.726.163 ^a	273.950 ^a	2.850.982 ^a	
- K ₄ = 0	408.043 ^a	-1.120.839 ^a	1.196.105 ^a	1.343.233 ^a	-	-	2.054.202 ^a
- K ₄ = 1	1.388.794 ^a	1.069.688 ^a	2.450.304 ^a	3.002.749 ^a	273.950	2.850.982 ^a	684.069 ^a